

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya. Penulis memilih SKPD ini atas pertimbangan bahwa pada SKPD Pemerintah Kota Tasikmalaya ini memiliki data-data yang sesuai dengan judul yang ada dalam penelitian ini.

3.1.1. Sejarah Pemerintah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibu kota dari kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi Kota Administratif. Tahun 1976, pada waktu A.Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintah kota yang mandiri pada masa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu H.Suljana W.H.

Sejarah lahirnya kota Tasikmalaya, mulai digulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh A.Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode 1976-1981. Pada saat itu melalui peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikan Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat

oleh H.Amir Machmud. Wali Kota Administatif pertama adalah Drs. H.Oman Roosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat H.Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideng dan Tawang dengan jumlah 13 Desa. Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. Suljana Wirata Hadisubrata (1996 -2001), dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H.Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, pembentukan Pemerintah Koata Tasikmalaya sebagai pemerintah daerah ototnomi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta. Selanjutnya tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H.Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Wali Kota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No.133 Tahun 2001, tanggal 12 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No.171/Kep.380/Dekon/2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. kemudia tanggal 14 Nomor 2002, Drs. H.Bubun Bunyamin dilantik

sebagai Wali Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai dengan Undang-undang No.10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa 54, tetapi dalam perjalannya melalui Perda No.30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi kelurahan, oleh karena itu, maka jumlah kelurahan menjadi 69 kelurahan, sedangkan untuk kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan antara lain:

1. Kecamatan Tawang
2. Kecamatan Cihideung
3. Kecamatan Cipedes
4. Kecamatan Indihiang
5. Kecamatan Kawalu
6. Kecamatan Cibeureum
7. Kecamatan Mangkubumi
8. Kecamatan Tamansari
9. Kecamatan Bungursari
10. Kecamatan Purbaratu

Berikut ini urutan pemegang jabatan Walikota Tasikmalaya dari terbentuknya Kota Administratis sampai menjelang terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya :

1. Drs. H .Oman Roesman (1976-1981)
2. H.Yeng Ds.Partawinata (1981-1985)
3. Drs. R. Y. Wahyu (1989-1992)
4. H.Erdhi Hardiana (1992-1994)
5. Drs. H. Bubun Bunyamin (1999-2002)
6. Drs. H. Syarif Hidayat. M.Si (2007-2012)
7. Drs. H.Budi Budiman (2012-2020)
8. Drs. H. Muhammad Yusuf (2020-Sekarang)

3.1.2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya

1. Visi

“Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju dan Madani”

2. Misi

- a. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal
- b. Memantapkan insfrastuktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- c. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkbn daya beli masyarakatmemenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

3.1.3. Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- b. Sekretariat DPRD melaksanakan tugas pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
- c. Inspektorat Daerah melaksanakan tugas pengawas penyelenggaraan pemerintah.
- d. Dinas yang meliputi :
 1. Dinas pendidikan, yang menyelenggarakan urusan pendidikan
 2. Dinas Kesehatan, yang menyelenggarakan kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan, Menengah, yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penindutrian dan perdagangan.
 6. Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan urusan perhubungan

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
8. Dinas Sosial, yang menyelenggarakan urusan sosial
9. Dinas Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi
10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian dan sebagian urusan kelautan dan perikanan
11. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang menyelenggarakan urusan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
13. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyelenggarakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penduduk dan keluarga
14. Dinas Lingkungan Hidup, yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, yang menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan

16. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

17. Satuan Polisi Pamong Praja , yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

e. Badan yang meliputi :

1. Badan Pendapatan Daerah, yang menyelenggarakan sebagian tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang pajak dan restribusi
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang melaksanakan tugas administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta bencana dan sub urusan kebakaran.

f. Kecamatan, melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah, meliputi:

1. Kecamatan Cihideung
2. Kecamatan Cipedes
3. Kecamatan Tawang
4. Kecamatan Indihiang
5. Kecamatan Kawalu
6. Kecamatan Cibeureum
7. Kecamatan Tamansari
8. Kecamatan Mangkubumi
9. Kecamatan Bungursari
10. Kecamatan Purbaratu.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019 : 1).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Menurut Nasir dalam Rukajat (2018: 1) Menjelaskan “Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta , sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Menurut Sugiyono (2018, 35) pengertian penelitian survey adalah Penelitian dengan menggunakan angket sebagai salah satu alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

3.2.1 Operasionalisasi variabel penelitian

Operasionalisasi variabel yaitu menguraikan variabel menjadi sebuah variabel (indikator) yang langsung menunjukan pada hal-hal yang diamati atau diukur. Menurut Sugiyono (2019:55) variabel penelitian adalah pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan untuk menentukan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu :

a. Variabel Independen (X)

Variabel independent (Bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau tumbuhnya variabel dependen (terikat)

(Sugiyono, 2019:57). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan (X1), dengan indikator:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap

Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), dengan indikatornya:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

b. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:57). Variabel *devendent* dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y), dengan Indikatornya:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan.

Operasionalisasi variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kompetensi sumber daya manusia bagian keuangan (X_1)	Kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atas tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan. (SKKNI 2013)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Sikap (SKKNI 2013)	Interval
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2)	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian Intern.	Interval

	peraturan perundang-undangan. (PP No. 60 Tahun 2008)	(PP Nomor 60 Tahun 2008)	
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Sesuatu yang memenuhi atau melebihi kriteria yang ditetapkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (PP No. 71 tahun 2010)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (PP Nomor 71 Tahun 2010)	Interval

Sumber: Data Olahan Peneliti

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sudaryono, 2018:205). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Studi kepustakaan yaitu penelitian melalui beberapa bacaan buku, literatur, dan keterangan ilmiah untuk memperoleh teori yang melandasi dalam menganalisa data yang diperoleh. Selain itu, teknik riset internet (*internet Research*) dimana untuk memperoleh teori dan data di peroleh melalui website www.bpk.co.id dan <https://jabar.bpk.go.id>.

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data penelitian ini dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Dilihat dari kebutuhan datanya, penelitian yang akan digunakan peneliti menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2017) Data primer adalah data

diperoleh dari lapangan secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data tidak diperoleh dari lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah diuji validitasnya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:130). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subyek yang berhubungan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan yaitu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang berada di Kota Tasikmalaya.

Tabel 3. 2
Populasi Penelitian

No	Nama SKPD Kota Tasikmalaya
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD

3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
8	Dinas Koperasi , Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Sosial
12	Dinas Tenaga Kerja
13	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
15	Dinas Penanaman Modal
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
19	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Satuan Polisi Pramong Praja
21	Badan Pendapatan Daerah
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25	Badan Pengelola Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Kecamatan Cihideng
28	Kecamatan Cipedes
29	Kecamatan Tawang
30	Kecamatan Indihiang
31	Kecamatan Kawalu
32	Kecamatan Ciberem
33	Kecamatan Tamansari
34	Kecamatan Mangkubumi
35	Kecamatan Bungursari

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2020

3.2.2.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena ada keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2018:131).

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdapat teknik sampling. Teknik sampling pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non probability sampling*. Dalam probabilitas sampling ini terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling* yang dimana teknik tersebut termasuk kedalam jenis teknik *non probability sampling*. Dalam buku Metode Penelitian oleh (Sugiyono, 2018: 85) menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis mengambil responden dari perangkat SKPD yang menjalankan pemerintahan. Pemilihan perangkat SKPD sebagai responden karena

perangkat SKPD merupakan bagian aktif dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga diharapkan informasi yang diinginkan oleh penulis dapat tepat sasaran. Untuk responden setiap SKPD adalah sebanyak 2 orang yang merupakan bagian keuangan, sehingga jumlah responden secara keseluruhan adalah sebanyak 72 orang responden.

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis untuk penelitian ini :

1. Penelitian Lapangan (*Field Reserch*)

Untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

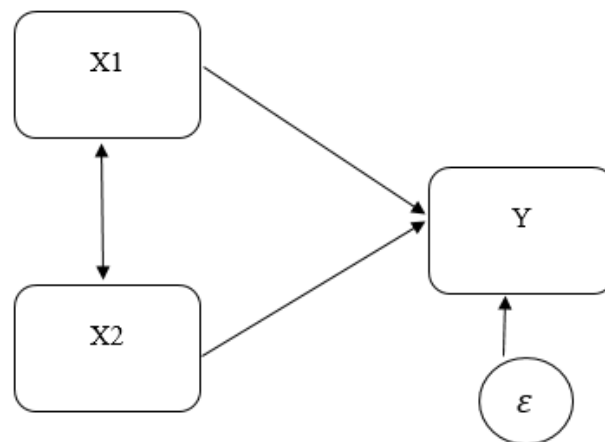
- a. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa di harapkan dari responden (Sugiyono, 2019:219).
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapat keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar.

2. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis mengkaji teori yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel, buku dan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan.

3.3 Model Penelitian

Menurut Sugiyono (2016: 63), model penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas) yang menjadi variabel independennya adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) dan yang menjadi variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y).



Gambar 3. 1

Model Penelitian

Keterangan:

X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Y = Kualitas Laporan Keuangan
 E = Faktor lain yang tidak diteliti

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:226) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

3.4.1 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2018 : 166). Oleh karena itu, setiap variabel akan diuji dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dan diolah memiliki mutu yang baik, sehingga kesimpulan yang akan dikemukakan terhadap hubungan antara variabel akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil penelitian dapat diterima.

3.4.1.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018:193) menjelaskan bahwa uji validitas adalah instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk

mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono & Susanto, 2017: 377).

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pertanyaan dengan skor total. Validitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari suatu instrumen, untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak adalah dengan melakukan uji signifikan koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05. Adapun rumus *pearson product moment* yang digunakan untuk menguji validitas dalam penelitian ini adalah :

Rumus Pearson Produk Moment

$$r = \frac{N(XY) - (X)(Y)}{\sqrt{(N(X^2) - (X)^2)(N(Y^2) - (Y)^2)}}$$

Keterangan:

- r = Koefesien Korelasi (Validitas)
- X = Variabel Bebas
- Y = Variabel Terikat
- XY = Skor pada subyek item n dikalikan skor total
- N = Jumlah yang diteliti

Jika koefesien korelasi bernilai positif dan lebih besar dari r tabel, maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah dan apabila bernilai negatif atau lebih kecil dari r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. Pengujian dilakukan dengan program *SPSS versi 25* dan menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Kriteria pengujian yaitu :

- a. Jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$, maka instrumen atau soal dalam pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- b. Jika $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$, maka instrumen atau soal dalam pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

3.4.1.2 Uji Reabilitas

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Efendi & Tukiran, 2012:141). Instrumen yang realibel berarti instrumen tersebut bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono & Susanto, 2017: 377).

Teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas ialah teknik *Crochbach's Alpha* pengujian reliabilitas dengan teknik *Crochbach's Alpha* ini dilakukan untuk jenis data interval. Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \alpha^{\frac{2}{b}}}{\alpha^{\frac{2}{t}}} \right]$$

Keterangan :

α = Koefisien reliabilitas alpha

k = Banyak butir pertanyaan dan butir soal

$\sum \alpha^{\frac{2}{b}}$ = Jumlah variasi butir

$\alpha^{\frac{2}{t}}$ = Variasi total

Koefisien reabilitas skala harus diusahakan tinggi yang besarnya mendekati satu. Kaidah keputusan menggunakan teknik *Crochbach alpha* yaitu jika nilai koefisien $\geq 0,70$ maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel.

3.4.2 Metode analisis data

Menurut Sugiyono (2018 : 226), mengungkapkan bahwa dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Menurut Sugiyono & Susanto (2017: 432) Analisis jalur digunakan untuk menelusuri hubungan antar variabel dalam model yang dibuat peneliti. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (Ghozali, 2012: 249). Tujuan digunakannya analisis jalur (*path analysis*) adalah untuk mengetahui pengaruh dari seperangkat variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen.

Untuk dapat melakukan analisis dengan analisis jalur maka perlu dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari responden yang disebar dengan menggunakan

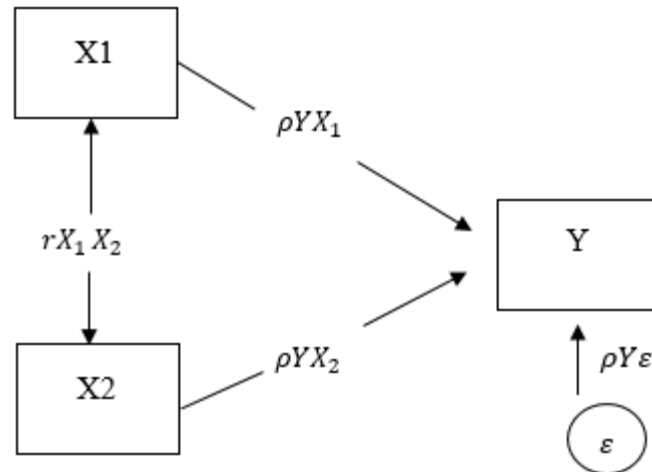
kuesioner. Perlu dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari jawaban responden dengan instrumen penelitian dengan skala *Likert*. tujuan instrumen penelitian tersebut untuk mentransformasi data kualitatif menjadi kuantitatif , sehingga dapat dianalisis dengan metode statistik yang telah ditetapkan. Adapun pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono. 2019:152). Untuk ketentuan skala *Likert* tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 3
Skor Skala Likert

Kriteria	Skor Item
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RG)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2019:153)

Adapun struktur analisis jalur yang merefleksikan variabel yang diteliti dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. 2
Struktur Analisis Jalur

Keterangan :

X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X2 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Y = Kualitas Laporan Keuangan

$r_{X_1Y_2}$ = Koefisien antara variabel X1 dan variabel Y2

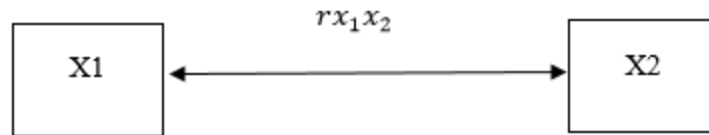
ρ_{YX_1} = Koefisien jalur variabel X1 terhadap variabel Y

ρ_{YX_2} = Koefisien jalur variabel X2 terhadap variabel Y

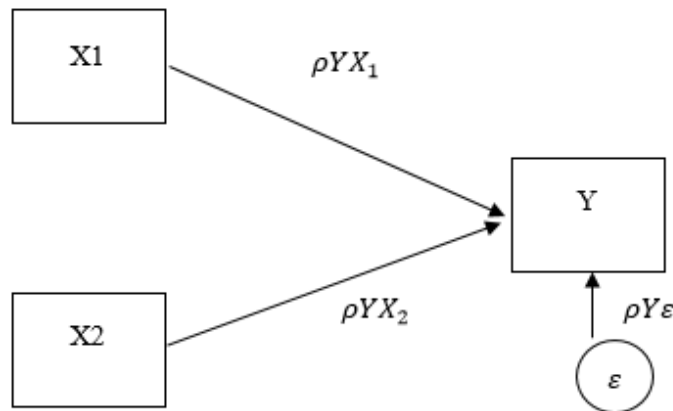
$\rho_{Y\epsilon}$ = Koefisien jalur variabel ϵ terhadap variabel Y

ϵ = Faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel Y

Dari stuktur analisis path (*path analysis*) diatas, dapat dibagi menjadi dua stuktur yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. 3
Substruktur I
Pengaruh X1 terhadap X2



Gambar 3. 4
Substruktur II
Pengaruh X1 dan X2 Terhadap Y

Dari stuktur *Path Analysis* di atas, terdapat langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Menghitung Koefisien korelasi (r) :

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel yang diteliti. Menghitung koefisien korelasi antara X1 dan X2 menggunakan rumus :

$$r_{x_1 x_2} = \frac{n \sum_{h=1}^n x_{ih} x_{jh} - \sum_{h=1}^n x_{ih} \sum_{h=1}^n x_{jh}}{\sqrt{\{(n \sum_{h=1}^n x_{ih}^2 - (\sum_{h=1}^n x_{ih})^2)\} \{(\sum_{h=1}^n x_{jh}^2 - (\sum_{h=1}^n x_{jh})^2)\}}}$$

Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubungan antar variabel kuat.

Demikian jika hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai r akan kecil,

besarnya koefisien korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 3. 4

Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien	Tingkat hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2018: 274)

2. Menghitung koefisien jalur dengan rumus :

$$\rho_{YXi} = b_{YXi} \sqrt{\frac{\sum_{h=1}^n x_{ih}^2}{\sum_{h=1}^n y_h^2}} \quad , i = 1, 2, 3, \dots, k$$

Dimana b_{YXi} dapat ditentukan melalui

$$b_{YXi} = \frac{\sum_{h=1}^n C_{ij} \sum_{h=1}^n X_{jh} Y_h}{\sum_{h=1}^n X_{jh}^2} ; i = 1, 2, \dots, k$$

keterangan:

ρ_{YXi} = Koefisien jalur dari variabel X_i terhadap variabel Y

b_{YXi} = Koefisien regresi dari variabel X_i terhadap variabel Y

3. Menghitung Koefisien Determinasi :

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Dimana : KP = Nilai Koefisien Determinasi

r = Nilai Koefisien Korelasi

4. Menghitung Pengaruh faktor residual/nilai sisa :

$$\rho_{y\epsilon_i} = \sqrt{1 - R^2_{y|x_1x_2\ldots x_k}}$$

Dimana :

$$R^2_{y|x_1x_2\ldots x_k} = \sum_{i=1}^k \rho_{yx_1} \rho_{y_i}$$

Keterangan :

$\rho_{y\epsilon_i}$ = koefisien jalur dari variabel lain yang tidak diteliti atau nilai sisa terhadap variabel Y

R^2_{yx} = koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua variabel penyebab variabel akibat

5. Pengujian Hipotesis Operasional

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Independen secara masing- masing terhadap variabel Dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t statistic (nilai t yang dihasilkan dari proses regresi) dan nilai t yang diperoleh dari tabel.

Tingkat signifikan ditetapkan sebesar 5% atau 0,05% karena menunjukkan bahwa korelasi antara kedua variabel cukup nyata. Tingkat signifikan 5% artinya kemungkinan besar 95% dari hasil penarikan kesimpulan menunjukkan kebenarannya atau memiliki toleransi kesalahan sebesar 5%. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial sebagai berikut:

- Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan

Ho : $\rho_{YX_1} = 0$, Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian

Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap

Kualitas Laporan Keuangan

Ha : $\rho_{YX_1} > 0$, Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian

Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

2. Untuk variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ho : $\rho_{YX_2} = 0$, Artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

Ha : $\rho_{YX_2} > 0$, Artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

- Menentukan pernyataan hipotesis

Ho : Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas

(X) dengan variabel terikat (Y)

Ha : Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X)

dengan variabel terikat (Y)

- Dasar Pengambilan Keputusan

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan t hitung dan t tabel :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan :

1. Jika nilai sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
 2. Jika nilai sig $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Sedangkan untuk menentukan nilai t tabel, digunakan kriteria:
 1. Taraf signifikan (α) sebesar 0,05
 2. Derajat bebas (db) = $t (\alpha/t ; n-k-1)$

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau semua variabel Independen terhadap variabel Dependen. Uji F dalam penelitian digunakan untuk menguji signifikan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis secara simultan sebagai berikut :

- Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} = 0$, Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

$H_a : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} \neq 0$, Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

- Dasar Pengambilan Keputusan

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan F hitung dan F tabel :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi :

1. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

- Sedangkan untuk menentukan F tabel digunakan kriteria :

1. Taraf signifikan (α) sebesar 0,05

2. Derajat bebas (db) = $F(k ; n-k)$

6. Penarikan kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, maka penulis akan menganalisa kemudian menarik kesimpulan,

Untuk mengetahui pengaruh total variabel X_1 , X_2 terhadap Y , baik secara langsung maupun tidak langsung melalui formula yang disajikan dalam tabel

3.5 berikut ini :

Tabel 3. 5

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian

No	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
1	Variabel X_1 $Y \leftarrow X_1 \rightarrow Y : (\rho_{YX_1})^2 = A$		A
		Melalui X_2 $Y \leftarrow X_1 \Omega X_2 \rightarrow Y$ $(\rho_{YX_1})(\rho_{X_1X_2})(\rho_{YX_2}) = B$	B
	Total pengaruh X_1 terhadap Y		A+B = C
2.	Variabel X_2 $Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y : (\rho_{YX_2})^2 = D$		D
		Melalui X_1 $Y \leftarrow X_1 \Omega X_2 \rightarrow Y$ $(\rho_{YX_1})(\rho_{X_1X_2})(\rho_{YX_2}) = E$	E
3	Total pengaruh X_2 terhadap Y		D+E =F
4.	Total Pengaruh X_1 dan $X_2 \rightarrow Y$ secara simultan (C+F)		G
5.	Pengaruh faktor residu $\epsilon_0 \rightarrow \rho_Y$ ϵ_0 dengan rumus (1-G)		H
	Total pengaruh X_1, X_2 dan ϵ terhadap Y		I